

Lembar Fakta

[Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan 2010 - Reformasi pengecualian agama](#)

Pemerintah Victoria baru-baru ini melakukan perubahan pada Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity Act) tahun 2010. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022. Perubahan tersebut memastikan keseimbangan yang lebih adil antara hak atas kebebasan beragama dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi.

Lembar fakta ini memberikan informasi tentang perubahan terhadap undang-undang anti-diskriminasi untuk badan-badan agama dan sekolah, dan komunitas negara bagian Victoria.

[Diskriminasi](#)

Diskriminasi adalah ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena suatu karakteristik pribadinya yang dilindungi oleh hukum.

Sesuai Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan (2010), diskriminasi atau pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup kehidupan publik tertentu, termasuk di tempat kerja, sekolah atau di toko-toko, merupakan pelanggaran hukum.

Namun, UU tersebut mengakui perlunya menyeimbangkan hak setiap orang, termasuk para penganut agama keyakinan suatu agama. Sebab itu, ada pengecualian yang membuat tindak diskriminasi dalam keadaan tertentu tidak melanggar hukum.

[Pengecualian Keagamaan](#)

Sebelum tanggal 14 Juni 2022, Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity Act) tahun 2010 memungkinkan badan-badan agama dan sekolah yang dijalankan berdasarkan agama untuk mendiskriminasi seseorang oleh sebab salah satu karakteristik pribadi sebagai berikut:

- jenis kelamin
- orientasi seksual
- kegiatan seksual yang sah
- status pernikahan
- status sebagai orangtua
- identitas gender.

Karakteristik yang disebut di atas akan disebut “karakteristik pribadi yang ditonjolkan” dalam lembar fakta ini.

Ini berarti bahwa berdasarkan salah satu karakteristik pribadi yang ditonjolkan, badan-badan agama dan sekolah yang dijalankan berdasarkan agama boleh secara absah:

- menolak masuknya calon siswa
- mengeluarkan siswa
- menolak mempekerjakan seseorang
- memecat seseorang, atau
- memperlakukan seseorang secara berbeda.

[Perubahan pada Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan \(Equal Opportunity Act\) tahun 2010 mulai dari tanggal 14 Juni 2022](#)

Mulai dari tanggal 14 Juni 2022, badan-badan dan sekolah keagamaan yang dijalankan berdasarkan agama dilarang mendiskriminasi seseorang berdasarkan salah satu karakteristik pribadi yang ditonjolkan dalam hal:

- keputusan tentang ketenagakerjaan
- keputusan tentang pelajar sekolah.

Namun, mereka dapat mendiskriminasi seseorang berdasarkan kepercayaan agama, dalam beberapa keadaan tertentu, jika diskriminasi tersebut wajar dan proporsional.

Diskriminasi terkait ketenagakerjaan

Badan dan sekolah keagamaan tidak boleh memecat, menolak mempekerjakan seseorang atau dengan cara lain mendiskriminasi pekerja (dan calon pekerja) berdasarkan salah satu karakteristik pribadi yang ditonjolkan.

Sekarang, badan dan sekolah keagamaan hanya boleh mendiskriminasi karyawan

(dan calon pekerja) berdasarkan kepercayaan atau kegiatan agama orang tersebut hanya apabila:

- Kesesuaian dengan keyakinan agama merupakan syarat inti, esensial atau penting dari pekerjaan itu

Contoh perubahannya

Seseorang yang merupakan penganut agama Kristen dan transgender melamar menjadi Wakil Kepala Eksekutif suatu organisasi amal Kristen yang besar.

Organisasi tersebut tidak boleh menolak mempekerjakan pelamar tersebut karena dia transgender, oleh sebab mereka dilarang mendiskriminasi berdasarkan identitas gender.

Namun, ini tidak berarti bahwa organisasi tersebut akan dipaksa mempekerjakan pelamar tersebut apabila dia bukan calon yang terbaik.

- calon lain tidak dapat memenuhi syarat yang melekat itu oleh karena kepercayaan atau kegiatan agamanya
- diskriminasi itu wajar dan proporsional dalam keadaannya.

Diskriminasi terhadap pelajar sekolah

Sekolah keagamaan tidak boleh menolak masuknya, mengeluarkan atau dengan cara lain mendiskriminasi pelajar atau calon pelajar berdasarkan salah satu karakteristik pribadi yang ditonjolkan (misalnya, pelajar itu gay). Sekolah hanya boleh mendiskriminasi pelajar, atau calon pelajar, berdasarkan kepercayaan atau kegiatan agamanya, asalkan diskriminasi tersebut wajar dan proporsional dalam keadaannya dan:

- tindakan itu sesuai dengan doktrin, keyakinan, atau prinsip agama sekolah tersebut, atau
- diskriminasi tersebut wajar dilakukan sehingga tidak menyakiti keyakinan agama sekolah tersebut.

Diskriminasi oleh badan agama

Badan agama masih dapat mendiskriminasi berdasarkan salah satu karakteristik pribadi yang ditonjolkan dalam keadaan lain. Akan tetapi, ada persyaratan baru.

Diskriminasi tersebut harus dianggap wajar dan proporsional untuk keadaannya. Ini selain persyaratan yang ada bahwa harus:

- sesuai dengan ajaran atau kepercayaan agama itu, atau
- wajar dilakukan sehingga tidak menyakiti keyakinan penganut tersebut.

Diskriminasi oleh Individu

Individu tidak boleh mendiskriminasi dalam keadaan yang diliputi menurut Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan untuk mematuhi keyakinan agama.

Perubahan pada Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity Act) mulai dari tanggal 14 Desember 2022

Pada tanggal 14 Desember 2022, perubahan-perubahan lanjutan terhadap pengecualian keagamaan di UU Kesetaraan Kesempatan akan mulai berlaku.

Mulai dari tanggal tersebut, apabila menyediakan barang atau jasa yang didanai oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria, lembaga agama hanya akan dapat mendiskriminasi berdasarkan kepercayaan agama seseorang, dan tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi lain.

Apa yang tidak akan berubah?

Setelah tanggal 14 Juni dan 14 Desember 2022, badan dan sekolah keagamaan masih akan boleh mendiskriminasi sehubungan dengan:

- penahbisan atau pengangkatan imam, pendeta atau anggota ordo keagamaan
- pelatihan atau pendidikan orang-orang yang ingin ditahbiskan atau diangkat sebagai imam, pendeta agama atau anggota ordo keagamaan
- pemilihan atau penunjukan orang untuk melakukan fungsi yang berkaitan dengan, atau berpartisipasi dalam, ibadah atau praktik keagamaan apa pun.

Mematuhi Undang-Undang

Lembaga dan sekolah keagamaan berisiko mendapatkan pengaduan di depan Komisi Kesetaraan Kesempatan dan Hak-Hak Manusia jika tidak mematuhi persyaratan UU Kesetaraan Kesempatan.

Organisasi dan badan keagamaan yang juga pemegang kewajiban sesuai dengan UU Kesetaraan Kesempatan juga memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan yang wajar dan proporsional untuk menghapuskan diskriminasi sejauh mungkin. Hal ini disebut "kewajiban positif". Semata-mata menanggapi pengaduan yang timbul tidaklah cukup untuk mematuhi Undang-Undang.

Pemegang kewajiban dapat mencakup:

- pemberi pekerjaan
- penyedia akomodasi, pendidikan, barang dan jasa
- klub-klub dan organisasi olahraga

Informasi tentang cara untuk menanamkan kewajiban positif itu ke dalam praktik-praktik dan tata cara tersedia di situs web Komisi Kesetaraan Kesempatan dan Hak-Hak Manusia.

Informasi lebih lanjut tentang perubahan terhadap UU Kesetaraan Kesempatan tersedia di situs web Komisi Kesetaraan Kesempatan dan Hak-Hak Manusia Victoria.

Jika Anda menganggap bahwa Anda telah menderita diskriminasi, informasi lebih lanjut, nasihat dan layanan dukungan terdapat di situs web Departemen Keadilan dan Keselamatan Komunitas.

[Pertanyaan yang sering diajukan](#)

Apakah perubahan tersebut berarti bahwa sekolah keagamaan akan terpaksa mempekerjakan orang yang tidak menganut keyakinan agama mereka?

Tidak. Jika memiliki keyakinan agama yang sama adalah persyaratan melekat dari perannya (yaitu, merupakan bagian inti, penting atau esensial), maka sekolah keagamaan dapat memilih untuk hanya mempekerjakan orang yang memegang keyakinan agama yang sama dengan sekolah itu.

Apakah perubahan tersebut berarti bahwa sekolah keagamaan tidak akan bisa lagi mengajarkan agama mereka?

Tidak. Usulan UU tersebut tidak mempengaruhi hak orangtua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah keagamaan yang mengajarkan dan mempraktikkan agama mereka.

Apakah Victoria adalah satu-satunya tempat di dunia dengan jenis UU ini?

Tidak. Ada undang-undang serupa di Tasmania yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade.

Apakah perubahan tersebut berarti bahwa badan-badan keagamaan tidak dapat memutuskan siapa yang diizinkan menjadi pendeta atau imam?

Tidak. UU Kesetaraan Kesempatan sudah mengizinkan badan-badan keagamaan untuk memutuskan siapa yang dapat dipilih untuk peran yang melibatkan praktik atau ibadah keagamaan, seperti menjadi pendeta atau imam. Hal ini tidak diubah dan tidak terdampak oleh amendemen tersebut.

Apakah perubahan tersebut berarti bahwa sekolah keagamaan harus menerima siswa yang menganut agama lain?

Tidak. UU Kesetaraan Kesempatan sudah mengizinkan sekolah keagamaan untuk hanya menerima siswa dari agama yang bersangkutan. Perubahan-perubahan pada UU tersebut berarti bahwa sekolah keagamaan dapat terus hanya menerima siswa dari agama yang bersangkutan, jika hal ini wajar dan proporsional dalam keadaannya.

Apakah sekolah keagamaan boleh memutuskan untuk tidak mempekerjakan seorang guru hanya karena dia gay atau adalah orangtua yang tidak menikah?

Tidak. Sekolah keagamaan tidak boleh menolak mempekerjakan seseorang oleh karena orientasi seksual atau status pernikahan mereka.

Apakah sekolah keagamaan diharuskan mempekerjakan seseorang bahkan jika keyakinan agama orang tersebut berbeda dengan keyakinan agama sekolah itu?

Tidak. Dalam keadaan tertentu, yaitu di mana keyakinan agama adalah persyaratan melekat dari perannya (yaitu, merupakan bagian inti, penting atau esensial), suatu sekolah masih bisa memutuskan untuk tidak mempekerjakan seseorang jika keyakinan orang tersebut berbeda dengan keyakinan agama sekolah itu.

Apakah perubahan terhadap UU Kesetaraan Kesempatan menciptakan standar ganda dengan membolehkan kelompok lain, seperti partai politik, untuk memilih siapa yang mereka pekerjakan, padahal badan-badan keagamaan kehilangan hak ini?

Tidak. Badan dan sekolah keagamaan dapat terus memilih siapa yang mereka pekerjakan berdasarkan keyakinan agama. Akan tetapi, mereka tidak dapat mendiskriminasi berdasarkan atribut yang tidak terkait, seperti seksualitas atau identitas gender. Demikian pula, partai politik hanya dapat memilih siapa yang mereka pekerjakan berdasarkan keyakinan politik orang tersebut tetapi tidak berdasarkan atribut lain yang tidak terkait.

Apakah perubahan tersebut melanggar hukum hak asasi manusia internasional?

Tidak. Perubahan tersebut akan secara tepat menyeimbangkan hak atas kebebasan beragama dengan hak atas kesetaraan sehingga keduanya dapat diakui dan dinikmati secara layak.

Apakah perubahan tersebut menciptakan kuasa baru bagi hakim untuk memutuskan kelayakan agama dari sebuah lembaga atau sekolah beragama?

Tidak. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Australia, ada kalanya pengadilan mungkin perlu membuat keputusan tentang agama apa yang dianut oleh suatu badan atau sekolah keagamaan, berdasarkan bukti yang ada. Ini adalah keadaan menurut undang-undang yang berlaku di Australia dan akan tetap diberlakukan menyusul perubahan terhadap UU Kesetaraan Kesempatan.

Perubahan tersebut tidak menciptakan kuasa baru bagi para hakim untuk menentukan agama yang “terbaik” atau “yang paling tepat”. Kepercayaan atau kegiatan agama tetap menjadi suatu atribut yang dilindungi menurut UU Kesetaraan Kesempatan.

Siapa yang termasuk dalam definisi “badan agama”?

Suatu badan agama didefinisikan sebagai:

- suatu badan yang didirikan demi tujuan agama.
- suatu entitas yang mendirikan, mengarahkan, mengatur atau mengelola sebuah entitas pendidikan atau amal lainnya yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran, keyakinan atau prinsip-prinsip agama.

Apa yang dimaksud dengan “mematuhi ajaran, keyakinan atau prinsip agama”?

Untuk mengandalkan pengecualian ini, suatu badan agama harus menunjukkan perlunya diskriminasi karena:

- agamanya menyatakan bahwa mereka harus bertindak dalam cara tertentu (yaitu, tidak memberi mereka alternatif)



Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission

- apabila mereka bertindak dengan cara lain, berarti bahwa hal-hal yang benar-benar penting untuk ajaran, keyakinan atau ibadah mereka tidak dihormati

Fokusnya harus pada:

- perilaku khusus yang ingin dilakukan oleh badan keagamaan; dan
- bagaimana perilaku itu diperlukan untuk mematuhi keyakinan agama.

Ini adalah penilaian objektif. Artinya, bukan pandangan pribadi diskriminator terduga yang relevan, melainkan suatu pandangan yang tidak memihak tentang apakah perilaku tersebut diperlukan.

Saluran Pertanyaan 1300 292 153

Faks 1300 891 858

NRS Voice Relay 1300 555 727 lalu sebutkan 1300 292 153

Jasa Juru Bahasa 1300 152 494

Email enquiries@veohrc.vic.gov.au

Twitter twitter.com/VEOHRC

Facebook facebook.com/VEOHRC

Situs Web humanrights.vic.gov.au

Hubungi kami